

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015-2020

Oleh: Ranti Iskasari

(Dibawah bimbingan: Prof. Dr. H. Elfindri, SE, MA and Dr. Rahmi Fahmy, SE, MBA)

Ringkasan

Terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas angkatan kerja, tingginya pengangguran merupakan persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang akan menimbulkan masalah serius jika tidak dicarikan pemecahannya. Salah satu solusi dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah melalui mekanisme perencanaan ketenagakerjaan yang terintegrasi antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri. Penelitian ini mencoba melihat permasalahan ketenagakerjaan dari sisi persediaan dan kebutuhannya di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2012, dari keseimbangan persediaan dan kebutuhan dapat dianalisis neraca tenaga kerja. Untuk lebih aplikatifnya penelitian ini dilakukan proyeksi untuk tahun 2015-2020. Selanjutnya diakhir penelitian ini kiranya dapat dirumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan menggunakan data sekunder berupa Sakerda 2005-2012, SUPAS 2005, Sensus Penduduk 2010 dan PDRB 2005-2012, maka hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tahun 2005-2012 terjadi pertumbuhan persediaan tenaga kerja yang lebih tinggi daripada kebutuhannya sehingga membawa dampak ketidakseimbangan pada neraca tenaga kerja berupa cukup tingginya jumlah pengangguran terbuka. Terdapat 4-9 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja sepanjang tahun 2005-2012. Hasil proyeksi tahun 2015-2020 masih menunjukkan ketidakseimbangan pada neraca tenaga kerja. Walaupun pertumbuhan persediaan tenaga kerja sudah lebih kecil dari kebutuhannya, namun karena nilai absolut persediaan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan tetap saja menghasilkan jumlah pengangguran yang masih tinggi, sehingga selama tahun 2015-2020 diperkirakan terdapat 4-11 orang pengangguran dari 100 orang angkatan kerja.

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian, maka Arah kebijakan dan program ketenagakerjaan yang dapat direkomendasikan adalah: (1) Arah kebijakan pengendalian jumlah persediaan Tenaga Kerja (Program Pengendalian jumlah angkatan kerja melalui pengendalian jumlah penduduk dan Program Pengendalian jumlah angkatan kerja tidak terdidik melalui mekanisme pendidikan), (2) Arah kebijakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Program peningkatan SMK berbasis pasar kerja, Program pengembangan pelatihan keahlian menyeluruh dan pusat pemagangan), (3) Arah kebijakan perluasan kesempatan kerja (Program pengembangan pekerjaan alternatif diluar pekerjaan utama, program Pengoptimalan Public works terpadu, Mewujudkan fungsi intermediary bank dan Peningkatan jumlah UKM/ wirausaha, Meningkatkan peranan sektor informal dan Program revitalisasi sektor- sektor yang mempunyai daya serap tenaga kerja tinggi dan memperbaiki iklim investasi)